

## PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH

### *DEVELOPMENT OF FARMERS' INSTITUTIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT AID*

**Deni Irawan<sup>1\*</sup>, Rika Andriati Sukma Dewi<sup>2</sup>, Moh. Samsul Rijal<sup>3</sup>, Aji Nasrul Fiddin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Rakyat, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Indonesia

<sup>3</sup>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia

\*Email penulis korespondensi: rika@unram.ac.id

#### ABSTRAK

Penguatan kelembagaan organisasi petani berperan krusial dalam meningkatkan efektivitas program bantuan pemerintah di sektor pertanian, terutama bagi petani skala kecil di negara berkembang. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika perkembangan kelembagaan petani serta strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan dukungan pemerintah guna memperkuat ketahanan pertanian di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan survei lapangan. Penelitian ini berfokus pada kelembagaan petani di desa Bunut Baik (Kecamatan Praya) dan desa Kateng (Kecamatan Praya Barat), dengan sasaran utama kelompok tani dan koperasi petani sebagai organisasi penting dalam pengadaan sarana produksi, pemasaran, serta pengelolaan usaha tani. Bantuan yang diberikan pemerintah, terutama pupuk subsidi, memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian kelompok tani. Namun, untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan kelembagaan, dibutuhkan dukungan lebih lanjut dalam bentuk alat-alat pertanian, teknologi, serta pelatihan yang intensif. Proses pengajuan bantuan yang lebih mudah juga akan membantu mempercepat penguatan kelembagaan.

Kata-Kata Kunci: Penguatan kelembagaan, Organisasi petani, Bantuan pemerintah, Ketahanan pertanian

#### ABSTRACT

Institutional strengthening of farmer organizations plays a crucial role in enhancing the effectiveness of government assistance programs in the agricultural sector, particularly for small-scale farmers in developing countries. This study explores the dynamics of institutional development within farmer organizations and identifies strategies to optimize the utilization of government support to strengthen agricultural resilience at the local level. Employing a mixed-methods approach, this research integrates both quantitative and qualitative methods to achieve comprehensive results. Primary data were collected through in-depth interviews and field surveys. The study focuses on farmer organizations in Bunut Baik village (Praya District) and Kateng village (West Praya District), with primary targets being farmer groups and farmer cooperatives, which serve essential roles in the provision of production resources, marketing, and agricultural business management. Government assistance, particularly in the form of subsidized fertilizer, is instrumental in supporting the productivity of these farmer groups. However, further support in the form of agricultural tools, technology, and intensive training is needed to promote institutional independence and sustainability. Simplifying the application process for assistance could also accelerate institutional strengthening.

Keywords: Institutional strengthening, Farmer organizations, Government assistance, Agricultural resilience

#### PENDAHULUAN

Perkembangan kelembagaan organisasi petani memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan pemerintah di sektor pertanian, terutama di negara-negara berkembang. Kelembagaan yang kuat memungkinkan petani, terutama mereka yang memproduksi dalam skala kecil, untuk lebih mudah mengakses dukungan, teknologi, dan layanan dari pemerintah (de Janvry & Sadoulet 2020). Namun, upaya memperkuat

kelembagaan petani sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas organisasi, dan kurangnya koordinasi antara petani dan pemerintah (Gede et al., 2020). Mengatasi tantangan ini sangat penting agar petani dapat terintegrasi secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan dan program, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam memanfaatkan dukungan pemerintah secara optimal.

Program bantuan pemerintah, seperti subsidi, pelatihan, dan penyediaan teknologi pertanian, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Namun, tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, manfaat dari program-program ini mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani (Anang & Asante, 2020). Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana organisasi petani berkembang dalam merespons dan memanfaatkan bantuan pemerintah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas integrasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani.

Perkembangan kelembagaan organisasi petani memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan pemerintah di sektor pertanian, terutama di negara berkembang. Kelembagaan yang kuat memungkinkan petani, khususnya produsen skala kecil, untuk lebih mudah mengakses dukungan, teknologi, dan layanan yang disediakan oleh pemerintah (Lowder et al., 2017). Namun, proses penguatan kelembagaan petani sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas organisasi, dan kurangnya koordinasi antara petani dan pemerintah (Balkrishna et al., 2024). Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memastikan integrasi yang efektif antara petani dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani agar dapat terlibat dan memanfaatkan dukungan pemerintah.

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pemerintah di sektor pertanian sangat terkait dengan perkembangan kelembagaan organisasi petani. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berskala besar, dipadukan dengan inovasi strategis dalam teknologi informasi dan komunikasi, dapat memungkinkan penyesuaian dan pencocokan berbagai pilihan pertanian dengan beragam konteks sosial-ekologis yang ada pada sistem pertanian petani kecil (Nelson et al., 2019). Pendekatan terintegrasi ini menjanjikan untuk lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan heterogen yang dihadapi oleh produsen skala kecil, dengan memberdayakan mereka untuk secara aktif membentuk dan mengakses teknologi, layanan, serta mekanisme dukungan yang paling relevan dengan kondisi lokal dan strategi penghidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan kelembagaan dalam organisasi petani, menyelidiki interaksi mereka terhadap program bantuan pemerintah, serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam mengoptimalkan dukungan/bantuan dari pemerintah.

## METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kombinasi (*mixed methods*), yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian lebih komprehensif dan mendalam.

### Pengumpulan Data

Data Primer: Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan para pemangku kepentingan, termasuk pimpinan kelembagaan petani, anggota kelembagaan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, survei lapangan juga dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai efektivitas bantuan pemerintah terhadap kelembagaan petani.

### Metode Analisis

- Analisis Kuantitatif: Hasil survei akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk melihat tren umum dan hubungan antara variabel yang diteliti, seperti jenis bantuan dan dampaknya terhadap kelembagaan.
- Analisis Kualitatif: Data hasil wawancara dan diskusi kelompok akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, guna mengidentifikasi tema-tema kunci dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan petani.

### Sampel Penelitian

Penentuan sampel penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, di mana daerah yang dipilih merupakan wilayah yang telah menerima bantuan pemerintah secara signifikan, serta memiliki kelembagaan petani yang aktif.

### Sasaran Penelitian

Penelitian ini menjangkau kelembagaan petani yang telah menerima bantuan pemerintah di desa Bunut Baik kecamatan Praya dan desa Kateng kecamatan Praya Barat. Kelembagaan yang menjadi fokus antara lain:

- Kelompok Tani: Sebagai bentuk organisasi di tingkat petani yang memiliki peran penting dalam aktivitas bersama seperti pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian.
- Koperasi Petani: Sebagai lembaga ekonomi yang mengorganisir petani untuk mengelola usaha tani, pengolahan produk, hingga distribusi dan pemasaran hasil produksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, kelembagaan petani pada dasarnya dibentuk untuk mempermudah akses petani terhadap bantuan pemerintah, terutama bantuan pupuk subsidi, alat-alat pertanian, serta bantuan terkait teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kelompok tani seperti Patuh Angan dan Aik Kerit melibatkan masyarakat, kepala desa, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam pembentukannya. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini memperkuat legitimasi kelompok di mata anggota dan pihak luar, serta menegaskan komitmen bersama untuk membangun kelembagaan yang kokoh.

Melalui kelompok ini, diharapkan para petani dapat lebih efektif dalam memanfaatkan bantuan pemerintah dan menjalankan kegiatan bersama. Strategi kelembagaan yang diusung mengutamakan pengembangan kapasitas anggota untuk mengelola sumber daya dan peluang yang ada secara mandiri. Dengan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, kelompok ini berusaha mempermudah anggotanya dalam mengakses fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus memperkuat keberlanjutan ekonomi pertanian lokal.

Peran ketua dalam Kelompok sangat sentral dalam memastikan kelancaran operasional kelembagaan. Tanggung jawab utama ketua adalah memimpin rapat anggota, menangani masalah internal, dan mengoordinasi penerimaan bantuan dari pemerintah. Selain itu, ketua bertugas mengatur rapat tahunan yang membahas isu-isu penting seperti iuran kelompok dan distribusi pupuk bersubsidi. Kepemimpinan yang diterapkan bersifat kolegial dan transparan, di mana seluruh anggota diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta suasana keterbukaan dan kerja sama yang harmonis di dalam organisasi.

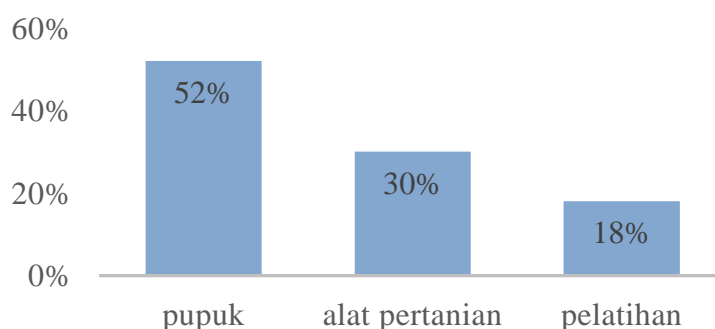
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam memimpin kelompok adalah ketidakpatuhan anggota dalam menyediakan dana iuran tepat waktu untuk pembelian pupuk bersubsidi. Selain tantangan internal ini, ada juga kendala eksternal seperti keterbatasan sumber

daya keuangan dan perubahan kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi operasional kelompok. Meski demikian, konflik internal jarang terjadi, dan jika muncul, biasanya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan. Mekanisme penyelesaian konflik yang efektif ini turut mendukung keberlanjutan kelembagaan dan menjaga stabilitas kegiatan kelompok tani.

Anggota Kelompok Tani Patuh Angan secara aktif terlibat dalam program-program organisasi, terutama melalui partisipasi dalam pembayaran iuran kas bulanan sebesar Rp150.000. Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan simpan pinjam, yang menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi bagi anggota. Sama halnya dengan Kelompok Tani Aik Kerit, anggota kelompok selalu berpartisipasi aktif terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani. Tingkat partisipasi yang tinggi ini mencerminkan komitmen kuat anggota terhadap tujuan kelembagaan, serta menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebersamaan dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini juga mencerminkan soliditas kelompok dalam mendukung kemandirian ekonomi petani di wilayah tersebut.

### **Bantuan Pemerintah Terhadap Kelembagaan**

Selama lima tahun terakhir, bantuan yang diterima kelompok tani baik kelompok tani Patuh Angan dan Aik Kerit didominasi oleh pupuk subsidi yaitu sebesar 52% seperti terdapat pada Gambar 1. Selain itu terdapat juga bantuan lain berupa alat pertanian seperti pompa air atau alat pemipil jagung yang sudah jarang digunakan, serta beberapa kali pelatihan. Namun, tidak semua kelompok mendapatkan bantuan alat secara teratur. Sebagian kelompok merasa prosedur pengajuan bantuan melalui proposal sangat kompleks dan lama, sementara kelompok lainnya mengeluhkan kelangkaan pupuk serta keterlambatan distribusi.



**Gambar 1.** Persentase bantuan pemerintah yang diterima oleh Kelompok Tani Patuh Angan dan Aik Kerit selama 5 tahun terakhir

Kendala dalam pengajuan proposal menjadi salah satu faktor utama mengapa kelompok tani sulit mendapatkan bantuan yang lebih beragam. Hubungan dengan penyuluh pemerintah juga dinilai kurang aktif, yang mengakibatkan kurangnya pendampingan dan arahan yang memadai dalam proses pengajuan dan pemantauan proposal. Padahal, penyuluh memiliki peran penting dalam membantu kelompok tani memenuhi prosedur pengajuan yang kompleks (Wibisono, 2014). Keterlibatan aktif penyuluh tidak hanya memperkuat hubungan antara kelembagaan tani dan pemerintah, tetapi juga dapat mempercepat proses pengajuan bantuan yang lebih tepat sasaran (Wiratma & Gorda, 2020).

Meski terbatas, bantuan pupuk subsidi yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan para anggota yang mayoritas merupakan petani dan peternak aktif. Ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan yang diterima tidak beragam, distribusi pupuk

subsidi sudah tepat sasaran dan membantu kegiatan pertanian mereka. Namun, kebutuhan kelompok tani tidak hanya berhenti pada pupuk; bantuan lain seperti peralatan dan teknologi pertanian sangat diperlukan untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan usaha tani dalam jangka panjang. Bantuan dalam bentuk alat pertanian modern dan teknologi tepat guna akan membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja kelompok tani secara menyeluruh, sehingga dapat memperkuat kemandirian kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan petani (Soedarto et al., 2019).

Pupuk subsidi memberikan dampak positif yang signifikan karena harga yang lebih terjangkau mampu mengurangi biaya produksi bagi anggota kelompok. Hal ini tentu mendukung keberlangsungan usaha pertanian mereka. Selain itu, subsidi pupuk juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian anggota kelompok, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Ariwibowo & Endaryono, 2021). Namun, karena belum maksimalnya bantuan lain seperti alat pertanian atau pelatihan teknologi, dampak bantuan ini masih terbatas pada sektor tertentu saja. Untuk itu, dibutuhkan jenis bantuan yang lebih beragam, seperti alat pertanian modern atau teknologi tepat guna, guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kinerja kelompok tani secara menyeluruh.

Salah satu tantangan terbesar lainnya yaitu yang dihadapi oleh kelompok ini adalah kelangkaan dan keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi pada waktu yang dibutuhkan terutama selama musim tanam. Untuk mengatasi masalah ini, kelompok tani berusaha mengelola stok pupuk yang ada secara lebih efisien. Meskipun demikian, perbaikan sistem distribusi oleh pihak terkait sangat diperlukan untuk mencegah keterlambatan yang merugikan di masa mendatang. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam distribusi pupuk bersubsidi akan membantu menjaga ketersediaan pupuk saat dibutuhkan oleh petani, terutama selama musim tanam. Hal ini akan mendukung produktivitas pertanian dan memastikan bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal (Soedarto et al., 2019).

### **Dampak Bantuan Terhadap Perkembangan Kelembagaan**

Subsidi pupuk dari pemerintah terbukti sangat membantu petani, khususnya dalam menekan biaya produksi pertanian. Dampak langsungnya terlihat pada peningkatan hasil panen dan produktivitas anggota kelompok tani. Namun, meskipun manfaat subsidi ini signifikan, ketergantungan yang berlebihan pada bantuan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kemandirian kelembagaan. Alih-alih mendorong kemandirian, ketergantungan pada subsidi dapat membuat kelembagaan petani semakin tergantung pada dukungan pemerintah untuk mempertahankan produktivitas. Dalam jangka panjang, kemandirian kelembagaan memerlukan bantuan yang lebih beragam, seperti peralatan pertanian dan teknologi, agar petani dapat lebih mandiri tanpa harus terus bergantung pada subsidi pupuk.

Jika dibandingkan dengan bantuan yang diterima pada masa awal pembentukan kelembagaan di tahun 2000-an, dampak dari bantuan pupuk subsidi saat ini terasa kurang signifikan. Pada awal pembentukan, kelompok tani menerima berbagai bantuan seperti bibit, benih tanaman, dan ternak, yang berhasil meningkatkan semangat anggota dan mendorong perkembangan kelembagaan secara substansial. Bantuan yang beragam ini memacu motivasi anggota dan memperkuat kelembagaan. Namun, saat ini, dengan bantuan yang hanya berfokus pada subsidi pupuk, perkembangan kelembagaan berjalan lebih lambat. Akibatnya kelompok tani tidak memiliki dorongan yang cukup untuk mengembangkan inisiatif dan inovasi internal yang dapat memperkuat kelembagaan mereka secara mandiri. Meskipun jumlah anggota dan kapasitas kelembagaan tetap stabil,

semangat dan partisipasi anggota tidak sebesar ketika mereka mendapatkan bantuan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Meski demikian, bantuan pupuk subsidi tetap memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian anggota kelompok. Subsidi ini memungkinkan petani untuk menggunakan pupuk dalam jumlah yang memadai tanpa harus menanggung beban biaya tinggi dari harga pasar. Dengan adanya subsidi, petani dapat mengakses pupuk dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka secara berkelanjutan (Adnyana & Mohktar, 2019). Hal ini juga membantu mengurangi biaya produksi yang dihadapi oleh para petani (Butaflika, 2022). Namun, produktivitas ini masih sangat bergantung pada kelancaran distribusi pupuk, yang sering kali terkendala oleh masalah seperti keterlambatan penyaluran dan kelangkaan pupuk di lapangan, sehingga mengurangi efektivitas bantuan tersebut.

Selain itu, bantuan pupuk subsidi tampaknya tidak berpengaruh besar terhadap hubungan antar anggota kelompok tani. Beberapa tantangan internal, seperti keterlambatan dalam pembayaran uang tebusan pupuk subsidi, masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun subsidi membantu dalam hal produktivitas, ada masalah dalam pengelolaan internal kelompok, terutama terkait disiplin keuangan dan tanggung jawab anggota (Nurholifah et al., 2023). Masalah-masalah ini seperti keterlambatan dalam pembayaran uang tebusan pupuk subsidi dapat berpotensi melemahkan solidaritas dan kekompakan anggota jika tidak segera ditangani dengan baik. Diperlukan upaya untuk meningkatkan disiplin keuangan dan tanggung jawab anggota guna memperkuat kelembagaan dan menjaga keberlangsungan kelompok tani. Meskipun konflik besar tidak terlihat, masalah-masalah ini berpotensi melemahkan solidaritas dan kekompakan anggota jika tidak segera ditangani dengan baik.

Keberhasilan kelembagaan dalam memanfaatkan bantuan pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya adalah penggunaan pupuk subsidi secara tepat guna dan tidak disalahgunakan. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Selain itu, keberhasilan juga dapat dilihat dari peningkatan produktivitas pertanian secara keseluruhan, kemampuan kelembagaan dalam mempertahankan jumlah anggota, serta perannya dalam mendukung keberlanjutan kesejahteraan petani.

### **Keberlanjutan Kelembagaan**

Wawancara mengungkapkan bahwa meskipun Kelompok Tani telah menunjukkan tanda-tanda kemandirian, terutama melalui inisiatif pengumpulan iuran anggota yang dikelola sebagai modal usaha dalam sistem simpan pinjam, ketergantungan pada bantuan pemerintah masih cukup tinggi. Iuran yang dihimpun dari anggota berfungsi sebagai modal untuk mendukung usaha kecil anggota kelompok, yang kemudian dilunasi melalui angsuran bulanan. Inisiatif ini merupakan langkah awal menuju kemandirian finansial kelembagaan, namun hambatan struktural seperti kurangnya modal besar dan akses terhadap teknologi modern tetap sulit diatasi tanpa intervensi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kemandirian finansial sepenuhnya belum tercapai.

Upaya kelompok tani dalam mengembangkan inisiatif mandiri, meskipun sudah berjalan, masih menemui tantangan besar terutama saat menghadapi kondisi sulit seperti musim kemarau. Ketiadaan alat dan teknologi irigasi yang memadai, seperti sumur bor, membuat mereka kesulitan melakukan budidaya secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan kelembagaan masih sangat bergantung pada dukungan eksternal, terutama ketika menghadapi krisis iklim atau keterbatasan sumber daya alam (Sudarma

& As-syakur, 2018). Untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan, bantuan pemerintah dalam bentuk teknologi dan peralatan pertanian masih sangat diperlukan.

Lebih lanjut, penelitian mengungkapkan bahwa program bantuan pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat kelembagaan kelompok tani. Kritik utama berasal dari ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan aktual petani dan prosedur yang terlalu rumit, seperti kewajiban pengajuan proposal yang berbelit-belit. Petani berpendapat bahwa proses mendapatkan bantuan sebaiknya disederhanakan, tanpa prosedur birokratis yang panjang, dan lebih diarahkan pada penyediaan alat-alat pertanian serta teknologi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perbaikan dalam penyederhanaan prosedur dan penyesuaian bantuan sesuai kebutuhan spesifik kelompok tani menjadi sangat mendesak (Soedarto et al., 2019).

Sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah oleh kelompok tani juga masih belum diimplementasikan secara optimal. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas menunjukkan kelemahan dalam tata kelola internal kelembagaan, terutama terkait dengan transparansi dan penggunaan bantuan yang efisien. Ketiadaan sistem pengawasan ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak maksimal atas bantuan yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kelompok tani untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal agar bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan anggotanya (Effendi et al., 2022).

Untuk menjaga keberlanjutan dan perkembangan kelembagaan petani, strategi utama yang harus diterapkan adalah memperkuat solidaritas dan kapasitas internal organisasi. Kelompok tani perlu mempererat hubungan antar anggota dan membangun kemampuan internal dalam hal keuangan dan manajemen. Selain itu, kelompok harus merumuskan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif untuk pengembangan kapasitas anggotanya, seperti pelatihan keterampilan, pengelolaan modal usaha, dan diversifikasi kegiatan ekonomi. Langkah-langkah ini akan membantu kelembagaan tetap berkembang dan mandiri, terlepas dari adanya bantuan pemerintah.

Dalam rencana jangka panjangnya, kelembagaan juga harus mencakup upaya untuk memperkuat kapasitas melalui program-program berkelanjutan, baik dalam hal pengembangan modal usaha maupun dukungan teknis bagi anggota. Di sisi lain, akses terhadap sumber daya eksternal perlu terus ditingkatkan, termasuk kemitraan dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah yang dapat mendukung pertumbuhan kelompok tani (Sulastri et al., 2022). Selain itu, penting bagi kelembagaan untuk memanfaatkan bantuan pemerintah secara optimal melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, sehingga bantuan yang diberikan dapat benar-benar mendukung pertumbuhan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan (Gede & Supadmi, 2018).

### **Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan**

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kelompok tani membutuhkan jenis bantuan yang paling mendesak saat ini berupa peralatan pertanian seperti traktor, sumur bor untuk irigasi, serta teknologi tepat guna, terutama untuk menghadapi tantangan cuaca kering. Bantuan tersebut dinilai sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu kelompok tani dalam mengatasi kendala iklim. Ketergantungan pada metode tradisional di musim kemarau menyebabkan hasil panen yang kurang optimal, sehingga akses terhadap teknologi modern dan alat pertanian menjadi solusi prioritas.

Wawancara juga mengungkapkan harapan kelompok tani bahwa pemerintah dapat memperbaiki kebijakan terkait prosedur pengajuan bantuan. Mereka berharap

proses pengajuan bantuan dapat dipermudah dan tidak terlalu birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai distribusi bantuan yang tidak merata antara wilayah utara dan selatan, di mana wilayah selatan dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan, yang seharusnya lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di berbagai daerah.

Kelompok tani Patuh Angan mengakui bahwa mereka belum secara optimal memanfaatkan bantuan pemerintah, baik pada tahun ini maupun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan internal pada kelembagaan mereka, seperti keterbatasan kapasitas dalam mengakses atau mengelola bantuan yang tersedia. Dalam konteks ini, penulis tidak dapat memberikan rekomendasi kepada kelembagaan petani lainnya, mengingat kelompok tani sendiri merasa belum maksimal dalam memanfaatkan program bantuan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa kelompok tani belum memperoleh pelatihan atau pendampingan yang memadai dari pihak pemerintah. Akibatnya, mereka tidak dapat memberikan penilaian terkait dampak dari pelatihan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan dan pendampingan merupakan komponen penting yang masih kurang dalam dukungan pemerintah terhadap kelembagaan petani. Pemerintah diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan pelatihan yang relevan, seperti dalam pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta upaya peningkatan produktivitas pertanian.

Secara umum, wawancara telah mencakup berbagai isu penting terkait relasi antara kelembagaan petani dan bantuan pemerintah. Dua poin utama yang terungkap adalah perlunya perbaikan dalam prosedur pengajuan bantuan, serta kebutuhan untuk memastikan perhatian pemerintah yang lebih merata terhadap kelompok tani di seluruh wilayah. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa semua kelompok tani, tanpa memandang lokasi geografisnya, memperoleh akses yang adil terhadap bantuan serta sumber daya yang dibutuhkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Bantuan yang diberikan pemerintah, terutama pupuk subsidi, memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian kelompok tani. Namun, untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan kelembagaan, dibutuhkan dukungan lebih lanjut dalam bentuk alat-alat pertanian, teknologi, serta pelatihan yang intensif. Proses pengajuan bantuan yang lebih mudah juga akan membantu mempercepat penguatan kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. P. C. P., & Mohktar, M. S. (2019). Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi Ntb. *Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 201. <https://doi.org/10.24843/Soca.2019.V13.I02.P05>
- Ariwibowo, P., & Endaryono, B. T. (2021). *The Purchase Power Of The Community And Government Subsidies On Msme Production Performance In The Covid-19 Pandemic*. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb>
- Balkrishna, A., Singh, S. K., Pathak, R., & Arya, V. (2024). E-Governance Paradigm In The Indian Agricultural Sector. *Discover Agriculture*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/S44279-024-00012-7>



- Butaflika, B. (2022). *Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Pringsewu The Impact Of The Kartu Petani Berjaya Program On Rice Production And Income In Pringsewu District*. 10(2), 163.
- De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2020). Using Agriculture For Development: Supply- And Demand-Side Approaches. In *World Development*, 133. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105003>
- Effendi, N., Dewi, V. I., Erviani, E., Budiono, B., Priyono, A. F., & Sapulette, M. S. (2022). Peningkatan Pemahaman Program Bantuan Dan Insentif Bagi Pelaku Usaha Umkm, Serta Peran Digitalisasi Di Era Pandemi Covid-19 Dan Sesudahnya. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 236. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6291>
- Gede, I., Putra, E., Sentanu, S., & Khoirunisa, M. (2020). *Can Institutional Capacity Building Improve Farmer's Welfare? A Case Study of Farmers' Association Of Water Users In Malang Regency*.
- Gede, P. I. G. A., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *E-Jurnal Akuntansi*, 1939. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p12>
- Lowder, S. K., Bertini, R., & Croppenstedt, A. (2017). Poverty, Social Protection And Agriculture: Levels And Trends In Data. In *Global Food Security* 15; 94–107. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.06.001>
- Nelson, R., Coe, R., & Haussmann, B. I. G. (2019). Farmer Research Networks As A Strategy For Matching Diverse Options And Contexts In Smallholder Agriculture. *Experimental Agriculture*, 55(S1), 125–144. <https://doi.org/10.1017/S0014479716000454>
- Nurholifah, S., Fauzi, A., Naufalya, N., Putra, A. S., & Maharani, A. (2023). Peran Dan Fungsi Internal Control Biaya Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 98-108.
- Soedarto, T., Hendrarini, H., Agribisnis, J., Pertanian, F., & Timur, J. (2019). *Pengembangan Perilaku Petani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Bangkalan Madura*.
- Sudarma, I. M., & As-Syakur, Abd. R. (2018). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian Di Provinsi Bali. *Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 87. <https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p07>
- Sulastri, S., Adam, M., Saftiana, Y., Nailis, W., & Putri, Y. H. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Model Kanvas Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6120>
- Wibisono, A. (2014). *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka*.
- Wiratma, I. N. A., & Gorda, A. A. N. O. S. (2020). The Implementation of Money Grant Program to Customary Villages and Community Groups From Good Governance Perspective: Case Study in Badung Regency. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 106–124. <https://doi.org/10.33701/jtp.v12i2.1279>